

PENGENDALIAN IMPOR KEDELAI DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL

NI MADE SUYASTIRI Y.P

Staf Pengajar Fakultas Pertanian UPN "Veteran" Yogyakarta

ABSTRACT

Food is primary necessity for a country. Soybean that contains many essential protein is one of important food in Indonesia. In fact, as raw material of tahu, tempe, soy sauce, and milk industry, it is very popular and consumed by almost all people in Indonesia. Along with population and industrial development, soybean necessity is raising.

Soybean almost two million tons is needed every year and 60 % soybean necessity fulfillment is imported from other country. Soybean importation is up to 1,1 million per year. Excessive soybean importation cause negative impact for agriculture development and be able to damage domestic industrial agriculture. Furthermore, import dependency can spend many devisa and in long run will threaten food security. This paper is going to explain about soybean importation control as an effort to reach food security.

Key words : control, import, soybean, food security.

PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan yang paling mendasar dari suatu bangsa. Upaya untuk mencapai kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pangan (*food self reliance*) harus disadari sebagai bagian yang mendasar bagi ketahanan pangan (*food security*) nasional yang harus dilindungi. Pemenuhan pangan yang cukup bagi penduduk merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Kebijakan pengadaan pangan yang selama ini diterapkan adalah bertujuan untuk menjamin pasokan pangan yang dibutuhkan masyarakat. Pengadaan pangan termasuk kedelai dapat dipenuhi melalui produksi domestik dan impor produk pangan dari negara lain.

Kedelai merupakan salah satu bahan pangan penting di Indonesia karena kedelai sebagai sumber protein nabati banyak dikonsumsi oleh penduduk Indonesia dan dimanfaatkan sebagai bahan baku industri tahu, tempe, kecap, susu. Seiring dengan laju perkembangan penduduk dan perkembangan industri yang berbahan baku kedelai maka kebutuhan kedelai semakin meningkat. Disisi lain, produksi kedelai dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan trend yang semakin menurun. Menurunnya produksi kedelai

disebabkan oleh lima hal, yaitu : Pertama, menurunnya gairah petani untuk menanam kedelai karena dianggap kurang menguntungkan dibanding menanam komoditas lainnya. Kedua, banjir kedelai impor dengan harga yang lebih murah. Ketiga, produktivitas kedelai nasional masih rendah karena belum menerapkan teknologi secara tepat. Keempat, lemahnya modal petani terutama untuk membeli sarana produksi. Kelima, dukungan pemerintah untuk usaha peningkatan produksi kedelai belum optimal, baik kebijakan impor, kebijakan permodalan, maupun kebijakan sarana produksi (Anonim, 2005).

Masalah utama yang memacu peningkatan impor adalah (1) produksi hasil pertanian di Indonesia belum mampu untuk memenuhi permintaan pasar dalam negeri. Ketergantungan pangan impor akan menciptakan kerentanan ketahanan pangan nasional berkaitan dengan risiko dan ketidakpastian penyediaan pangan dunia dan situasi pasar pangan internasional. (2) Adanya impor ilegal mengakibatkan hilangnya sebagian pendapatan negara dari bea masuk dan pajak impor lainnya. Disamping itu dengan tidak diketahuinya secara pasti total impor komoditas pangan utama akan

berdampak pada rawannya sistem ketahanan pangan nasional menjadi tidak efektif.

Praktek penyelundupan (impor ilegal) akan menimbulkan dampak negatif seperti persaingan yang tidak sehat antara importir yang benar dan jujur dengan importir yang melakukan impor secara ilegal. Produk dalam negeri akan bersaing secara tidak sehat dengan produk impor yang disinyalir bermuatan *dumping* dan subsidi ekspor yang pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan industri di dalam negeri. Walaupun sudah dilakukan penolakan terhadap impor komoditi tertentu ternyata banyak yang dapat masuk secara ilegal. Hal ini disebabkan karena penerapan penegakan hukum yang masih belum tegas. Demikian juga dengan penerapan tarif impor yang jauh di bawah *binding rate* bahkan tidak jarang 0%, mendorong masuknya impor secara berlebihan.

Impor pangan yang berlebihan akan memberikan dampak yang negatif bagi pembangunan pertanian dan dapat merusak industri pertanian di dalam negeri. Oleh karena itu perlu penanganan dalam kaitannya dengan pelaksanaan impor sekaligus untuk melindungi konsumennya dari berbagai penyakit yang mematikan yang terbawa oleh pangan impor. Tulisan ini akan mengkaji tentang pengendalian impor kedelai dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional

SITUASI KEDELAI DALAM NEGERI DAN IMPOR KEDELAI

Menurut BPS (2004), produksi kedelai beberapa tahun terakhir cenderung

menurun drastis. Pada tahun 1999 produksi mencapai 1.382.848 ton, namun pada tahun 2003 produksi hanya sebesar 672.000 ton. Produksi kedelai tidak mampu memenuhi kebutuhan kedelai sehingga harus impor. Impor yang berlangsung terus menerus dalam jangka panjang akan mengganggu ketahanan pangan disamping menguras devisa negara.

Dengan adanya program Bangkit Kedelai yang telah dimulai pada tahun 2004, produksi diharapkan dapat mencapai sekitar 1 juta ton atau produksi pada tahun 2004 diperkirakan meningkat 1,07 % dan harapannya pada tahun 2008 Indonesia akan mencapai swasembada kedelai dengan produksi \pm 2 juta ton. Namun realita yang ada sekarang Indonesia belum mampu mewujudkan swasembada kedelai dan justru sebaliknya yakni impor kedelai secara besar-besaran terpaksa dilakukan pemerintah dengan tariff 0%. Hal ini guna memenuhi kebutuhan kedelai dan menekan lonjakan harga kedelai yang begitu drastis pada Nopember 2007-Januari 2008 yang mencapai Rp. 7500,-/kg – Rp 7.800,-/kg. Kelangkaan kedelai menyebabkan terjadinya kenaikan harga kedelai yang begitu drastis. Kenaikan harga kedelai ini tentu akan memberi dampak pada industri yang berbahan baku kedelai seperti meningkatnya harga jual tempe, tahu, kecap, susu atau produk-produk lain yang berbahan baku kedelai. Perkembangan produksi, luas panen dan produktivitas kedelai di Indonesia disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 . Perkembangan Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Kedelai, Indonesia Tahun 1999 - 2004

No	Tahun	Produksi kotor (ton)	Luas Panen (ha)	Produktivitas (kw/ha)
1	1999	1.382.848	1.151.079	12,01
2	2000	1.017.634	824.484	12,34
3	2001	826.932	678.848	12,18
4	2002	652.755	546.216	11,95
5	2003	672.000	526.000	12,77
6	2004	717.480	560.000	12,81

Sumber: BPS Diolah Subdit Pemasaran Internasional Tanaman Pangan, Tahun 2004

Sejak tahun 2000, impor kedelai meningkat secara drastis seiring dengan signifikannya penurunan produksi pada tahun tersebut. Impor kedelai selama periode 2000-2003 meningkat dengan laju 14,03 % per tahun, tahun 2004 impor kedelai mencapai 1,3 juta ton plus

bungkil 1 juta ton dan terus meningkat sampai saat ini. Hal ini mengindikasikan program Bangkit Kedelai tidak berhasil meningkatkan produksi kedelai.

Tabel 2. Ketersediaan Kedelai Indonesia, Tahun 1999 – 2004

No	Tahun	Produksi Bersih (ton)	Konsumsi (ton)	Ketersediaan (ton)	Kecukupan (ton)
1	1999	1.267.847	3.038.178	2.569.597	- 468.581
2	2000	933.905	3.092.872	2.211.069	- 881.803
3	2001	758.540	3.204.412	1.893.771	- 1.310.641
4	2002	598.356	4.058.344	1.963.373	- 2.094.971
5	2003	617.444	4.120.227	1.809.992	- 2.310.235
6	2004	659.291	4.186.157	1.311.196	- 2.874.961

Sumber : BPS dan Pusat PKP Badan Bimas Ketahanan Pangan, diolah Subdit Pemasara Internasional Tanaman Pangan, Tahun 2004

Harga kedelai impor tahun 2004 sebesar Rp. 3.073,63,-/kg dan pada Januari 2007 harganya mencapai Rp. 7.800,-/kg sudah lebih dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya, hal ini berakibat pada industri yang berbahan baku kedelai (industri tempe/tahu) eksistensinya mulai terancam. Untuk mengatasi kenaikan harga kedelai ini, pemerintah berupaya menurunkan harga dengan membebaskan bea masuk, memberikan subsidi kedelai impor bagi produsen tahu-tempe sebesar Rp 1.000/kg.

Hampir 2 juta ton dibutuhkan setiap tahun dan 60 % kebutuhan kedelai impor didatangkan dari luar negeri. Salah satu kebijakan pangan yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi kelangkaan kedelai yang harganya kini kian melambung dalam tiga bulan terakhir (sejak Nopember 2007) yakni dengan membuka kran impor kedelai, pajak bea masuk kedelai yang 10 % dihapus. Penghapusan bea masuk ini belum tentu bisa mengkompensasi kenaikan harga yang lebih dari 100 %. Kebijakan pemerintah membebaskan pajak impor kedelai dan membuka kran impor kedelai hanya akan menurunkan harga kedelai dalam jangka pendek. Namun setelah itu harga kedelai akan kembali naik.

Perlu diberikan kebebasan bagi seluruh pengusaha yang mampu untuk melakukan impor kedelai di Indonesia untuk ikut bersaing, sehingga harga kedelai tak akan dipermainkan oleh 4 importir utama, seperti Cargill, Teluk Intan, Liong Seng, dan Gunung Sewu yang menguasai pasar Indonesia. Naiknya harga kedelai menyebabkan pengusaha tahu-tempe banyak yang gulung tikar. Begitu harga kedelai turun pemerintah akan kembali menaikkan bea masuk.

Perdagangan produk pertanian hasil tanaman pangan khususnya kedelai selama 5 tahun terakhir selalu dalam posisi defisit. Negatifnya neraca perdagangan Indonesia dalam periode tersebut terutama disebabkan oleh jumlah impor produk pangan lebih besar dibandingkan dengan jumlah eksportnya.

Tabel 3. Perkembangan Neraca Perdagangan Kedelai Tahun 2000- 2004

No	Tahun	Volume Ekspor (ton)	Volume Impor (ton)	Neraca (ton)
1	2000	521	1.277.685	- 1.277.164
2	2001	1.188	1.136.419	- 1.135.231
3	2002	235	-1.365.252	- 1.365.017
4	2003	169	1.192.717	- 1.192.548
5	2004	74	651.979*	- 651.906

Sumber: BPS Diolah Subdit Pemasaran Internasional Tanaman Pangan, Tahun 2004 Keterangan : * data sampai Juli 2004

Produk pangan yang diimpor Indonesia selama ini tidak hanya kedelai dan olahannya, melainkan juga gandum dan olahannya, gula, beras serta masih banyak produk pangan lainnya tergantung pada pasokan internasional. Dominasi impor produk pangan pada tahun 2001, untuk gandum dan olahannya sebesar 3,03 juta ton, beras dan olahannya sebesar 0,65 juta ton, kedelai dan olahannya sebesar 1,136 juta ton (BPS, 2001).

Jumlah populasi penduduk Indonesia yang begitu besar (230 juta jiwa) dan terus meningkat sehingga kebutuhan pangan domestik otomatis semakin besar dan meningkat. Impor pangan Indonesia meliputi jagung , kedelai, gula, susu, daging, buah-buahan dan makanan olahan dengan nilai antara USD 3,0 – 5,0 milyar per tahun, merupakan pemborosan devisa yang sangat besar (Tabel 4).

Tabel 4. Komoditi Pangan yang Dominan Diimpor Indonesia

No	Komoditas Pangan yang Diimpor	Rata-rata Impor (juta ton/ tahun)
1	Beras	± 2,00
2	Gula	± 1,60
3	Kedelai	± 1,13
4	Gandum	± 4,50
5	Jagung	± 1,20

Sumber: BPS diolah, 2001-2006

STRATEGI PENGENDALIAN IMPOR KEDELAI

Mengingat kebutuhan pangan termasuk kedelai terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk maka

untuk memenuhi kebutuhan kedelai yang selama ini 60 % tergantung pada impor maka perlu ada strategi untuk dapat mewujudkan swasembada kedelai. Strategi pengendalian impor kedelai dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan impor kedelai yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Ketergantungan impor yang begitu besar perlu suatu strategi dan perencanaan yang tegas yang didukung dengan kebijakan komprehensif agar komoditas yang termasuk pangan utama dapat diproduksi sendiri. Berbagai strategi yang dapat dilakukan antara lain; **Pertama**, Program jangka panjang yang perlu dilakukan adalah meningkatkan produksi dan produktivitas kedelai dalam negeri. Meningkatkan produksi kedelai dan hasil industri pengolahan dengan memperhatikan mutu produksi agar dapat bersaing dengan produk impor, sehingga dapat meningkatkan kecintaan produk dalam negeri. Beberapa tahun terakhir ini luas panennya menurun, yang berakibat penurunan produksi (Tabel 2). Produksi kedelai merosot karena petani enggan menanam komoditi ini karena harganya tidak kompetitif dibanding komoditas pertanian lainnya, seperti beras, jagung.

Kedelai dengan masa tanam tiga bulan diharapkan tahun ini produksi dalam negeri dapat mencapai 800.000 ton atau naik 200.000 ton dari tahun lalu. Karena kebutuhan dalam negeri mencapai dua juta ton, kenaikan produksi harus dilakukan secara bertahap dengan menyediakan lahan yang lebih luas (Kompas, 24/3'08). Penyediaan lahan yang lebih luas akan dapat terwujud jika mampu memperlambat laju menyempitnya lahan maupun konversi lahan pertanian yang sudah ada akibat terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Perlu diberlakukan insentif dengan

cara membebaskan pajak atas tanah yang masih subur dan produktif sehingga pemilik enggan untuk merubah fungsi lahannya. Peningkatan kinerja produksi dan produktivitas yang bernilai tinggi harus bertumpu pada perubahan penerapan teknologi unggulan untuk pengembangan komoditas kedelai yang tepat guna dan tepat terap agar dapat menjawab tantangan penyediaan pangan semakin kompleks dalam upaya mengurangi impor untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Kedua, untuk memperkuat ketahanan pangan nasional perlu memanfaatkan sumberdaya lokal dengan digalakkan kembali penanaman kedelai lokal, kacang koro, gude sebagai pendamping kedelai lokal untuk pemenuhan protein nabati. **Ketiga**, jika menempatkan kedelai sebagai pangan utama maka pemerintah perlu intervensi untuk mendorong petani menanam kedelai. Harus ada stimulus baik berupa sarana produksi maupun perlindungan manakala produksi dunia naik dan harga anjlok. Pemerintah mungkin bisa melindungi petani kedelai seperti menangani padi, sehingga ada *floor price* yang memberi rasa aman bagi petani (petani tidak dirugikan) dan Bulog perlu diaktifkan untuk menangani kedelai. Bulog mempunyai peran sebagai penyeimbang stock nasional sekaligus sebagai *price reference* (pembanding harga). **Empat**, menciptakan iklim makro yang dapat menumbuhkembangkan pengembangan pemasaran diantaranya melalui kebijakan fiskal dan moneter (tarif bea masuk, pengurangan pajak-pajak, kredit dengan bunga terjangkau, menghapus hambatan-hambatan perdagangan melalui deregulasi, atau kebijakan yang memihak para pelaku agribisnis). Mengenakan tarif bea masuk sesuai *binding rate*. **Kelima**, menegakkan pengawasan terhadap impor pangan yang illegal dan pembuatan Undang-undang Pembangunan Pertanian Jangka Panjang.

KETAHANAN PANGAN

Menurut UU no. 7/1996 tentang pangan. Dalam UU itu pembangunan pangan diletakkan dalam konsep ketahanan pangan (food security). Konsep yang diadopsi dari FAO di definisikan sebagai kemampuan

negara memenuhi pangan (warganya). Ada empat pilar yang tertuang dalam konsep ini yaitu: aspek ketersediaan (*food availability*), aspek stabilitas ketersediaan (*stability of supplies*), aspek keterjangkauan (*access to supplies*), dan aspek konsumsi pangan (*food utilization*).

WTO, menyebut ketahanan pangan sebagai ketersediaan pangan di pasar (*availability of food in the market*), pangan yang mengabdikan kepada pasar. Konkritnya mewujudkan dalam *beleid* "memanen pangan di pasar (impor), daripada memanen di lahan (menanam sendiri). Impor pangan dalam jangka pendek bisa menjadi obat kelaparan dan dalam jangka panjang tak hanya menguras devisa, tetapi mengabaikan aneka sumberdaya lokal. Ketika pangan tergantung impor meski berdaya dalam ekonomi dan militer, secara politik amat rentan seperti Uni Soviet hancur karena embargo Amerika Serikat. Ketahanan pangan baru akan terwujud jika kedaulatan pangan dimiliki rakyat. Oleh karena itu, pangan dan pertanian seharusnya tidak ditempatkan pada pasar yang rentan, tetapi ditumpukan pada kemampuan sendiri. Untuk menciptakan kedaulatan pangan, pemerintah harus menjamin akses tiap petani atas lahan, air, bibit, dan kredit. Di tingkat nasional, kebijakan reforma agraria, air untuk pertanian, aneka varietas lokal unggul dan kredit berbunga rendah harus jadi prioritas. Dalam lingkup sosial ekonomi, negara perlu menjaminstruktur pasar yang menjadi fondasi pertanian. Hal ini perlu dikembangkan guna mengatasi struktur pasar yang tidak adil di dalam negeri dan siasat atas struktur pasar dunia yang tidak adil bagi negara berkembang.

Ketahanan pangan, secara luas dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kecukupan pangan masyarakat dari waktu ke waktu. Kecukupan pangan dalam hal ini mencakup segi kuantitas dan kualitas, baik dari produksi sendiri maupun membeli di pasar. Terwujudnya sistem ketahanan pangan tersebut akan tercermin antara lain dari ketersediaan pangan yang cukup dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta terwujudnya diversifikasi pangan, baik dari sisi produksi maupun konsumsi. Pencapaian ketersediaan pangan harus memperhatikan

aspek produksi, pengaturan dan pengelolaan stok atau cadangan pangan, serta penyediaan dan pengadaan pangan yang cukup. Ketahanan pangan harus menjaga mutu dan gizi yang baik untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Mutu dan gizi yang baik dihasilkan dari pangan yang beragam, bergizi, bermutu dan halal untuk dikonsumsi. Mutu pangan yang dikonsumsi akan mempengaruhi kualitas sumberdaya manusia Indonesia (Suyastiri, 2007).

Kebijakan pembangunan pertanian pada tiga dekade terakhir tampak lebih berorientasi komoditi yang lebih ditekankan pada upaya peningkatan produksi yang cenderung kurang responsif terhadap perubahan keadaan pasar. Selain itu kebijakan ekonomi makro yang lebih mengarah pada upaya peningkatan sektor industri menjadikan sektor pertanian semakin "terlepas" dari sektor riil lainnya. Bahkan sektor ini hanya dipandang sektor pendukung yang diposisikan sebagai (1) pemasok bahan kebutuhan pangan dan bahan baku industri murah, (2) pengendali stabilisasi harga, dan (3) pemasok tenaga kerja murah (Solahuddin, 1998). Kebijakan pemerintah pada waktu itu cenderung mengarah pada intervensi pemerintah yang mengarah pada pengaturan pasar dan tidak mengarah sistem pangan pada mekanisme pasar.

Berdasarkan pengalaman dalam upaya peningkatan produksi pangan yang selama ini hanya berorientasi pada komoditi tertentu dan kurang didasarkan pada upaya peningkatan pendapatan petani bahkan disertai dengan intervensi pasar yang ternyata berakibat pada lemahnya sistem ketahanan pangan dan rapuhnya basis industri pengolahan hasil pertanian maka diperlukan reorientasi pasar dengan memanfaatkan sumberdaya secara optimal. Pemanfaatan sumberdaya optimal yang selama ini berjalan lebih ditekankan pada kegiatan "revolusi hijau" yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan dengan perluasan penggunaan varietas-varietas unggul ternyata menggunakan input kimia yang relatif tinggi. Hal ini ternyata menyebabkan timbulnya akumulasi unsur kimia dalam tanah yang disertai yang disadari atau tidak, justru berakibat pada terganggunya keseimbangan alam. Selain itu penggunaan input tinggi secara ekonomi justru dapat

menyebabkan usaha tani menjadi kurang menguntungkan dan tidak efisien. Dalam rangka peningkatan pangan dan industri berbasis pertanian (agroindustri secara luas) maka diperlukan upaya untuk memperkuat sistem pangan baik secara nasional maupun regional dengan memperhatikan keunggulan komparatif daerah. Untuk itu reorientasi kebijakan pertanian perlu diarahkan pada upaya-upaya :

- (1) Pemantapan sarana produksi dan peningkatan produktivitas
Dalam penggunaan pupuk dan obat-obatan, kesesuaian pemberian pupuk dalam jenis dan jumlah serta waktu yang tepat akan menentukan tingkat produksi tanaman, untuk itu perlu terus diupayakan penggunaan sarana produksi yang optimum yang didukung dengan mekanisme pendistribusian bagi seluruh wilayah. Kelangkaan pupuk yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia sebagaimana yang pernah terjadi di akhir tahun 2005 telah membuat petani risau/kesulitan mendapatkan pupuk dan walaupun tersedia harga melambung tinggi. Kondisi demikian membuat terganggunya proses produksi yang apabila berlangsung lama akan berakibat tidak baik pada produksi dan ketahanan pangan .
- (2) Peningkatan produksi yang mempertimbangkan kuantitas dan kualitas produksi yang bertujuan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani (termasuk masyarakat pedesaan) dan sekaligus mampu mengentaskan kemiskinan
- (3) Penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pemerataan kesempatan kerja secara adil bagi keluarga petani dan masyarakat pedesaan.
- (4) Pemberian fasilitas informasi pasar, baik nasional maupun internasional yang transparan pada petani sebagai pelaku bisnis di bidang pertanian.
- (5) Pembinaan yang mengarahkan dan memberikan kesempatan pada petani serta masyarakat pedesaan agar berperan dan mampu melaksanakan agribisnis dan

agroindustri yang didasarkan pada potensi daerah.

- (7) Pengembangan komoditi pertanian yang memperhatikan karakteristik sumberdaya dan keunggulan kompetitif dan komperatif, agar sumberdaya setempat dapat dilakukan secara optimal dan efisien. Tidak terlalu menitikberatkan pada sektor tanaman pangan, terutama padi, tetapi justru memperhatikan pada komoditi lain yang mendukung agroindustri setempat dan berorientasi ekspor atau untuk mengurangi impor. Misalnya kedelai yang mendukung industri tahu, tempe, kecap tetapi masih impor.

Kebijakan-kebijakan pertanian yang selama lebih dari 30 tahun selalu menganaktirikan sektor pertanian sudah saatnya dirubah. Negara Australia dan Thailand dapat dijadikan contoh. Australia memulai industrinya dari pertanian dan peternakan yang kuat. Dengan kekuatan tersebut kemudian Australia mendukung penyediaan bahan baku industri pengolahan dan menggalakkan ekspor. Devisa yang diperoleh dapat membangun dan membiayai pengembangan industri berteknologi tinggi. Kemajuan pertanian di Thailand dimulai dengan keseriusan pemerintah negara itu terhadap pertanian (agribisnisnya). Pemerintah menyediakan sarana dan insentif bagi petani mulai dari produksi sampai dengan sarana penunjang berupa tempat pemasaran yang tersebar, informasi permintaan pasar yang transparan dan sistem birokrasi yang tidak berbelit dalam ekspor hasil pertaniannya (Antik, 2002).

KESIMPULAN

1. Ketergantungan impor kedelai dalam jangka panjang akan berdampak negatif, disamping menguras devisa negara juga berakibat terganggunya ketahanan pangan nasional
2. Strategi pengendalian impor kedelai dapat dilakukan dengan peningkatan produksi dan produktivitas melalui mengurangi/menghambat alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, penerapan teknologi tepat guna serta memanfaatkan sumberdaya lokal dengan digalakkan kembali penanaman kedelai lokal, kacang koro, gude sebagai pendamping kedelai lokal.dan program bangkit kedelai dilaksanakan dengan optimal. Intervensi pemerintah melalui iklim makro yang dapat

menumbuhkembangkan pengembangan pemasaran diantaranya melalui kebijakan fiskal dan moneter

DAFTAR PUSTAKA

- Antik Suprihanti, 2002. Impor Pangan dan Kebijakan Pertanian. *Jurnal Dinamika Sosial Ekonomi*. UPN "Veteran" Yogyakarta.
- Anonim, 2005. *Strategi Pengendalian Impor Produk Pertanian*, <http://agribisnis.deptan.go.id> (15 Februari 2005)
- Anonim,2005. *Impor Kedelai, Setiap Tahun Mencapai 1,3 juta ton*. <http://disperindagjabar.go.id/artman/publi sh/> (2 Maret 2005)
- Anonim, 2005. *Data Base Pemasaran Internasional Kedelai*, <http://agribisnis.deptan.go.id/eksim/analisa/data%20base%20PI%20kedelai.pdf>. (29 Juni 2005)
- Anonim, 2008. *Meredam gejolak Harga Pangan*. Koran Tempo 2 Februari 2008
- Anonim, 2008. *Harga Pangan Ditunggu Stabil*. Kompas 24 Maret 2008
- Edy Suandi Hamid, 2008. *Krisis kedelai*. Kedaulatan Rakyat 21 Januari 2008, hal 1. Yogyakarta
- Endang Gumbira Sa'id. *Membangun Ketahanan Ekonomi Nasional melalui Agribisnis*. Institut Pertanian Bogor.
- Murti Lestari, 2008. *Kedelai: Krisis Energi, Globalisasi, Kearifan Lokal, dan Tempe Mlanding*. Kedaulatan Rakyat 1 Februari 2008, Yogyakarta
- Suyastiri, Ni Made. 2007. Efektivitas Kebijakan Impor Beras. *Jurnal Dinamika Sosial Ekonomi*. UPN "Veteran" Yogyakarta.